

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Banyaknya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut, tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Pariwisata adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai tinggi ekonominya bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung dan masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri, di samping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang

lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata merupakan hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.¹

Di Indonesia pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, selain karena faktor vital, banyak masalah yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, baik dalam skala regional maupun nasional. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut dapat ditempuh dengan jalan memanfaatkan dua sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia ialah hal yang paling penting dalam pembangunan, karena sumber daya manusia yang rendah menjadikan keadaan masyarakat kurang mampu dalam melihat dan mengatasi permasalahan hidupnya, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh

¹ Ian Asriandy, Skripsi, “*Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), h. 17.

karena itu usaha pengembangan sumber daya manusia yaitu hal yang harus dan perlu dilakukan.²

Pemberdayaan masyarakat yaitusalah satu strategi pembangunan desa maupun kecamatan. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan dengan jumlah penduduknya yang banyak. Oleh karenanya menambah potensi suatu daerah dan sumber-sumber produksi yang selama ini dibiarkan menjadi penting untuk diberdayakan. Sumber-sumber produksi seperti sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang jumlahnya cukup memadai untuk diberdayakan dalam pembangunan desa. Pembangunan pedesaan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk menambah kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Sumber daya alam dari suatu daerah sangat

² Sabtimarlia, Skripsi, "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi di Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 16-17.

berpotensi untuk kegiatan wisata. Potensi sumber daya alam dengan panorama keindahan alam terutama di desa masih sangat minim untuk diberdayakan.³

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dengan membentuk wilayah wisata digunakan untuk memberikan keuntungan yang luas dalam mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Warga yang tinggal di daerah objek wisata terkena imbasnya dari pembangunan wisata tersebut. Tuntutan kemampuan masyarakat yang terampil dalam melayani paket wisata menjadi ukuran untuk membuat suatu objek wisata. Untuk melakukan pembangunan dengan pendekatan tersebut dibutuhkan masyarakat yang lebih terbuka, inovatif, dan bersedia untuk kerja keras. Aktivitas pemberdayaan masyarakat diidentifikasi melalui kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat desa yang berhubungan dengan kegiatan daerah wisata.⁴

³ Asti Destiana, D. Suryatman, Nur Eka Setiowati, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Manis Kidul dalam Menunjang Pendidikan Formal di Objek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Edueksos*. Vol. V No. 1, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), h. 56.

⁴ Asti Destiana, D. Suryatman, Nur Eka Setiowati, “Pemberdayaan Ekonomi ...”, h. 57.

Dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan lokasi lingkungan. Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan, yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah satu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu daerah akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik dan produktif.⁵

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah barang serta jasa yang diproduksi. Sadono Sukirno mengatakan bahwa

⁵ Yusrodika Wiranto, Skripsi, *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat”*, (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar, 2015), h. 3.

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan barang serta jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat bertambah. Masalah perkembangan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makro ekonomi dengan jangka panjang yang didalamnya meliputi masalah kemiskinan masyarakat.

Garis kemiskinan di berbagai Negara tidak seragam, dan berubah menurut tingkat pendapatan atau tahap pembangunan ekonomi dan sosial suatu Negara. Pengertian garis kemiskinan ialah tingkat konsumsi minimal atau tingkat pengeluaran atau pendapatan yang memungkinkan orang biasa dapat hidup. Masih banyak warga yang penghasilannya terbatas, di atas batas garis kemiskinan. Kelompok yang termasuk dalam nyaris miskin ini sangat rawan terhadap perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah kemiskinan ini masih perlu untuk diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.⁶

⁶ A. Eka Avrianti, Skripsi, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Sinjai*", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), h. 1.

Menurut pakar, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, sebab kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Ditinjau dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan serta informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan pada bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Masalah kemiskinan di wilayah pedesaan dipicu oleh beberapa hal, diantaranya yaitu mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan. Selain itu, pada umumnya mereka tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan. Tingkat pendidikan rendah ini terjadi akibat mereka dahulu tidak ada waktu untuk belajar guna

membantu orang tua bekerja untuk menambah penghasilan. Karena tingkat pendidikan yang rendah ini, mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak diantara mereka menjadi buruh tani karena tidak mempunyai tanah atau pekerja kasar diluar pertanian.⁷

Pada konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting ialah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang

⁷ Nur Mualifah, Skripsi, “*Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 14.

sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat *top down*. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perspektif, Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua, partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri.⁸

Masyarakat Desa Pejaten mayoritas berprofesi sebagai petani karena tingkat pendidikan masyarakat desa ini relatif rendah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang minim. faktor yang mempengaruhi keadaan ekonomi tidak meningkat ialah pendapatan yang diperoleh sangat minim dari pekerjaannya sebagai buruh tani berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang timbul mengakibatkan tidak berkembangnya

⁸ Nur Rika Puspita Sari, Skripsi, "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui ...*", h. 5.

perekonomian secara aktif. Di Desa Pejaten adanya sebuah destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu wisata Gunung Pinang.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, di Desa Pejaten telah berusaha mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu upaya memberdayakan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan rencana strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis Perum Perhutani terdapat sejumlah program yang erat hubungannya dengan pembangunan di wilayah Desa Pejaten. Program tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari, peningkatan pengelolaan pariwisata, dan pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, program pengelolaan hutan dan wisata. Wisata kerjasama pengelolaan berbasis PHBM. Yaitu pengelolaan hutan bersama masyarakat. Adapun masyarakat disini ialah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

Di Desa Pejaten, memiliki sebuah destinasi wisata yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat, dan dampaknya

yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri, yaitu wisata alam Gunung Pinang. Wisata ini yang awalnya hanya hutan konservasi saja namun saat ini menjadi sebuah destinasi wisata di Kabupaten Serang Banten, dan saat ini di Desa Pejaten telah terbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang di pimpin oleh naim, dan beranggota ade subhi, sahrani, haroji, danu, irfanul, bedi, raidi, anis fuad, budiman, supandi, dan saipul. LMDH inimenghimpun masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengolah dan mengembangkan Desa Pejaten menjadi Desa tujuan wisata. LMDH tersebut merupakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah melalui pariwisata.⁹Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Gunung Pinang di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

⁹Naim, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan, wawancara dengan penulis di kawasan wisata Gunung Pinang, tanggal 1 Maret 2021

1. Bagaimana Bentuk pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Gunung Pinang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat di kawasan wisata Gunung Pinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Gunung Pinang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat di kawasan wisata Gunung Pinang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui objek wisata.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan dan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap akademisi, baik di kalangan UIN SMH Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu ini juga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa artikel, skripsi, dan jurnal terkait penelitian yang dilakukan peneliti:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tyas Arma Rindi. “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*” (*Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur*) di IAIN Metro Lampung 2019.¹⁰

Kesimpulan yang didapatkan dalam skripsi tersebut adalah bahwapemberdayaan yang ada di desa yang bergerak pada sektor pariwisata unggulan. Dengan destinasi yang ada di Wonokarto yaitu kerajinan bambu yang dibuat oleh sekelompok paguyuban guyup rukun, yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (podarwis) yang bertujuan untuk

¹⁰ Tyas Arma Rindi, Skripsi, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)*”, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019), (diakses, 23 Desember 2020).

memberdayakan masyarakat sekitar. Dalam ketiga potensi tersebut sangat berperan pada pemberdayaan masyarakat dan berpotensi mengurangi pengangguran dan mengurangi kejahatan. Serta dengan adanya desa wisata membuat masyarakat sibuk dan mempunyai pekerjaan sendiri, serta melibatkan partisipasi serta dapat memberdayakan masyarakat sekitar.

Sedangkan perbedaan yang diteliti penulis yaitu, berdasarkan tempat penelitian dimana penulis meneliti pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata Gunung Pinang di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten, dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari pihak pengelola obyek wisata Gunung Pinang, dan data sekunder, data yang bersumber dari Kantor Desa Pejaten meliputi data profil desa, potensi wilayah, data ekonomi dan lainnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sabtimarlia. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi, Pakembinangun, Pakem Sleman Daerah

Istimewa Yogyakarta”, di Universitas Negeri Yogyakarta 2015.¹¹

Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut adalah Hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisatanya yaitu meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat, berkembangnya pengelolaan Desa Wisata, dan tergalinya sumber daya alam dan budaya secara maksimal. Peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya kelompok karya katering wisata, kelompok tukang dan kelompok pemandu yang telah mengikuti berbagai macam pelatihan sehingga memperoleh dan meningkatkan keterampilan serta tambahan penghasilan.

Sedangkan perbedaan yang diteliti penulis yaitu, yang diteliti Sabtimarlaia lebih meningkatkan keterampilan masyarakatnya melauai terbentuknya katering wisata kelompok tukang dan sebagainya, sedangkan yang diteliti

¹¹ Sabtimarlaia, Skripsi, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambu, Pakembinangun, Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), (diakses, 23 Desember 2020).

saya lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya. Seperti memberdayakan masyarakat dari segi ekonomi dan lain sebagainya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Rika Puspita Sari. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul”, di Universitas Negeri Yogyakarta 2012.¹²

Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut adalah skripsi dari Nur Rika Puspita Sari lebih kepada program pelatihan-pelatihan dalam pemberdayaan masyarakatnya. Sedangkan perbedaannya dengan yang penulis teliti yaitu lebih kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan adanya pengembangan obyek wisata yang dilakukan oleh BUMN Perhutani, meliputi membuka lapangan kerja, dibangunnya fasilitas dan infrastruktur, mendorong seseorang untuk berwirausaha, pengembangan obyek wisata yang

¹² Nur Rika Puspita Sari, Skripsi, *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul”*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), (diakses, 23 Desember 2020).

dilakukan BUMN Perhutani dengan melibatkan masyarakat desa setempat, merupakan kesempatan berharga dan penting untuk pemberdayaan masyarakat.

F. Kajian Teori

1. Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “berdaya” yang berarti kekuatan kemampuan, bertenaga atau mempunyai akal (cara melihat dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Sedangkan menurut Eddy Ch. Papilaya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹³

Pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi “berdaya” artinya berkekuatan,

¹³ Uswatun Khasanah, Skripsi, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Studi di Dusun Pandes, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), h. 14-15.

berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu.¹⁴

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

2. Masyarakat

Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Max Weber menjelaskan pengertian masyarakat sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Koentjaraningrat menjabarkan

¹⁴ Anita Tri Widiyawati, “*Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi pada Perpustakaan Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember)*”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Vol. 4 No. 1, (Malang: Universitas Brawijaya Malang), h.83.

definisi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Menurut Ralph Linton masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama.¹⁵

¹⁵ Rista Formaninsi, Skripsi, “*Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan (Studi Kasus pada Keluarga Pelaku Pembunuhan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*”, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014), h. 27-28.

3. Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi yang dikemukakan Mubyarto adalah partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat awam pada umumnya, tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan program, pelaksanaan program, pengembangan program, dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Dasar partisipasi adalah tindakan pengambilan bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari awal.¹⁶

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara

¹⁶ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Press. H.109.

bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁷

Keragaman dalam menginterpretasikan pendekatan-pendekatan masyarakat makin meluas mulai dari perbedaan orientasi budaya, sampai dengan tujuan-tujuan dari berbagai kalangan yang menggunakan istilah tersebut ada yang bertujuan untuk menggeser struktur kekuatan politik, meningkatkan aktivitas ekonomi komunitas bisnis, dan membangun kebudayaan.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

¹⁷ Lifa Indri Astuti, Hermawan, Mochammad Rozikin, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 3 No. 11, (Malang: Universitas Brawijaya), h. 12.

¹⁸ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia h. 4.

keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁹

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat²⁰

a. Fungsi dan tujuan pemberdayaan masyarakat

Menurut Sunyoto Usman, fungsi dan tujuan masyarakat adalah memungkinkan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*”, (Jakarta: KENCANA, 2013), Cetakan Pertama. h. 24.

²⁰ Tita Ghea Tansia, Skripsi, “*Pelayanan Sosial Sekolah Alam Tunas Mulia dalam Memberdayakan Masyarakat Pemulung di Sumurbatu Bantargebang Kota Bekasi (Studi Kasus Program Pendidikan dan Program Usha Ekonomi)*”, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 17.

pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktifitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut unsur struktural (kebijakan), dan kultural.²¹

b. Bentuk-bentuk pembedayaan masyarakat

1. *The Welfare Approach*

The Welfare Approach merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu.

2. *The Development Approach*

The Development Approach merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan

²¹ Cholisin, “*Pemberdayaan Masyarakat*”, (Yogyakarta: UNY, 2011), h.2.

memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

3. *The Empowerment Approach*

The Empowerment Approach merupakan pemberdayaan masyarakat dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.²²

c. Pola-pola pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.

²² Tita Ghea Tansia, Skripsi, “*Pelayanan Sosial Sekolah ...*”, h. 29-30.

d. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat

Pertama, *ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya.

Kedua, *EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Ketiga, *PROTECTING* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya

dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.²³

e. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraanata kesejajaran kedudukan antaramasyarakat dan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat enstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat itu sendiri.

Untuk sampai pada tingkat tersebutperlu waktu dan

23

https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf, diakses pada 9 september 2021, pukul 23:41 WIB.

proses pendampingan yang melibatkan pendampingan yang berkomitmen tinggi pemberdayaan masyarakat

3. Prinsip kesewadayaan dan atau kemandirian

Prinsip kesewadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek ketidakmampuan.

4. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan sekalipun pada awalnya pendampingan lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus.²⁴

f. Kebijakan pemberdayaan masyarakat

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada

²⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sleman: CV. Budi Utama h. 11.

masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah:

1. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
2. Mencermati kedua rumusan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah.

3. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.
4. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) menetapkan visi, misi, kebijakan strategi dan

program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat
- Misi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.²⁵

g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi

²⁵ Tita Ghea Tansia, Skripsi, "*Pelayanan Sosial Sekolah ...*", h. 20-21.

kerakyatan mengandungmaksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.²⁶

Pemberdayaan ekonomi dari suatu daerah wisata dapat diperhatikan bila masyarakatnya banyak

²⁶ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, “Pemberdayaan Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 12,(Malang: Universitas Brawijaya), h. 9.

yang memanfaatkan peluang usaha di daerah wisata tersebut. Berbagai peluang usaha sebagai jasa layanan di daerah wisata sangat terbuka luas dan mampu untuk meningkatkan penghasilan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola usaha di daerah wisata menjadi bentuk pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Peluang usaha dalam bidang ekonomi di daerah wisata adalah bentuk fasilitas dan layanan wisata, seperti: membuka usaha toko makanan, minuman, penjualan oleh-oleh, dan berbagai layanan yang dibutuhkan wisatawan.²⁷

Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata, produk ini merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga yang bersifat sosial, psikologis

²⁷ Asti Destiana, D. Suryatman, Nur Eka Setiowati, "*Pemberdayaan Ekonomi ...*", h. 58.

dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi.

Dengan demikian yang dimaksud pemberdayaan ekonomi masyarakat di objek wisata merupakan bentuk potensi untuk menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau azas ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi untuk masyarakat di objek wisata dapat dilakukan yakni pengembangan pemberdayaan usaha kecil.²⁸

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di objek wisata dilakukan dengan pendekatan partisipasi dalam usaha ekonomi, baik secara individu maupun kelompok yang berupa layanan usaha wisata. Bentuk kegiatan perekonomian sebagai sumber pendapatan masyarakat di objek wisata ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peran masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dengan dibukanya usaha ekonomi dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dapat

²⁸ Asti Destiana, D. Suryatman, Nur Eka Setiowati, "*Pemberdayaan Ekonomi ...*", h. 60.

menunjang kegiatan wisata seperti warung-warung penjual makanan, sarana ibadah, toilet, tempat parkir dan lainnya.²⁹

3. **Wisata**

Berdasarkan Undang-undang Kepariwisata No.9 tahun 1990, Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata

Istilah wisata mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang bersifat sementara, dalam arti tidak untuk tinggal menetap ditempat yang dikunjungi tersebut
- Kegiatan perjalanan tersebut dilakukan secara sukarela (volentir), tidak karena paksaan

²⁹ Asti Destiana, D. Suryatman, Nur Eka Setiowati, "*Pemberdayaan Ekonomi ...*", h. 61-62.

- Tujuan perjalanan adalah untuk menikmati obyek wisata dan daya tarik wisata, dan tidak untuk mencari nafkah atau pekerjaan ditempat yang dikunjungi tersebut.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) adalah pembangunan pariwisata yang memperhatikan 3 hal yaitu : keberlangsungan pembangunan ekonomi pariwisata, sosial budaya, dan lingkungan hidup untuk kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Menurut konsep pembangunan pariwisata akan mempertimbangkan dan memerhatikan serta menjamin kelestarian sumber daya alam.³⁰

Konsep pengembangan pariwisata merupakan bagaimna cara pariwisata dikembangkan pada sebuah daerah untuk mencapai tujunnya ada beberapa konsep pengembangan pariwisata antara lain:

³⁰ Erika Revida, dkk, *Pengantar Pariwisata, Medan: Yayasan Kita Menulis* hal.12.

1. Quantity Tourism atau dikenal dengan Mas Tourism menekankan pada target kunjungan yang tinggi, pembangunan sarana prasarana dalam skala besar. Keberhasilan dilihat dari tingkat pendapatan melalui jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel akomodasi yang terisi
2. Konsep quality tourism, konsep ini lebih menekankan pada aspek berkelanjutan atau keajekan, dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, sampai budaya dan lingkungan.³¹

4. Ekowisata

Pengertian Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Ia bukan sekedar wisata alam semata. Konsep ekowisata memiliki pengertian, sejarah,

³¹ I Made Bayu Wismawa, dkk, *Manajemen Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Budi Utama h.10.

kriteria atau prinsip tersendiri dibandingkan wisata konvensional.

Konsep ekowisata mencoba memadukan tiga komponen penting yaitu konservasi alam, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan hidup. Hal ini ditujukan tidak hanya bagi pengunjung, tetapi melibatkan masyarakat setempat.

a) Manfaat ekowisata

Manfaat ekowisata berdampak dalam berbagai aspek. Manfaat tersebut meliputi aspek konservasi, pemberdayaan dan pendidikan lingkungan. Manfaat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Konservasi. Keterkaitan ekoturisme dan satwa terancam punah sangat erat, bahkan harus bersifat positif, sebagaimana studi yang dilakukan oleh peneliti Universitas Griffith. Wisata berkorelasi positif dengan konservasi berarti memberikan insentif ekonomi yang efektif untuk melestarikan,

meningkatkan keanekaragaman hayati budaya, melindungi warisan alam serta budaya di planet bumi.

- 2) Pemberdayaan ekonomi. Ekoturisme melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan kapasitas, kesempatan kerja masyarakat lokal. Konsep ekowisata adalah sebuah metode yang efektif untuk memberdayakan masyarakat lokal di seluruh dunia guna melawan kemiskinan, mencapai pembangunan berkelanjutan.
- 3) Pendidikan lingkungan. Melibatkan pendidikan lingkungan berarti kegiatan wisata yang dilakukan harus memperkaya pengalaman, juga kesadaran lingkungan melalui interpretasi. Kegiatan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan yang utuh terhadap alam, masyarakat, budaya setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan tiga komponen penting tersebut, maka tidak secara otomatis setiap

perjalanan wisata alam merupakan aktifitas wisata berbasis ekologi (*ecotourizm*).

Pariwisata alam yang berdasar pada lingkungan alam dan fokus objek-objek biologis, fisik maupun budayanya. Pariwisata alam merupakan bagian atau keseluruhan alam itu sendiri termasuk unsur-unsur budayanya disini konservasi sumberdsya alam merupakan suatu hal yang mendasar baik dalam perencanaan, pembangunan maupun manajemn pariwisata alamnya.³²

b) Contoh ekowisata

Contoh ekowisata berbasis lingkungan yang sudah berhasil adalah kegiatan di tangkahan di Langkat Provinsi Sumatera Utara. Beberapa tempat wisata di Medan Sumatera Utara juga merupakan inisiasi dari kegiatan ekoturisme. Contoh lainnya adalah taman safari di *Zimbabwe* atau Taman Nasional Komodo. Tidak banyak contoh ekowisata yang berhasil

³² Harini Muntasip, dkk, *Rekreasi Alam dan Ekowisata*, Bogor: IPB Press, h.11.

memenuhi prinsip dan kriteria sebagaimana ditetapkan, walaup diklaim sebagai *ekoturisme*.³³

5. Pengembangan Wisata

Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.³⁴

Dalam pengembangan wisata Gunung Pinang, upaya yang dilakukan oleh Perhutani untuk mengembangkan Objek Wisata Gunung Pinang adalah memberikan fasilitas sarana dan prasarana di Objek Wisata Gunung Pinang guna meningkatkan jumlah

³³ <https://lingkunganhidup.co/pengertian-ekowisata-dan-kriterianya/> diakses pada 22 Januari 2021.

³⁴ Yoeti, Oka, A. (2008) Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta, Pradaya Pratama, h. 273.

pengunjung, seperti adanya *flying fox*, sepeda, tempat spot foto yang indah, dan lain sebagainya.

6. **Perhutani**

Perum perhutani sebagai badan usaha milik negara mengemban tugas mengelola hutan negara sesuai kebijaksanaan pemerintah, yaitu menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan diwilayah kerjanya (pasal 5 ayat 1 PP No 36 th 1986). Sifat usaha perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (PP No 36 th 1986). Dalam PP No 36 th 1986 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa misi Perum Perhutani adalah menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program

pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).³⁶ Metode penelitian ini cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) dan sumber data penelitian kualitatif adalah bentuk tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis (*deskriptif*) yang

³⁵ Sandi Ari Cris Nugraheni, Skripsi. “Kontribusi perum perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan serta potensi kemitraannya”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007),h. 9-10.

³⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 8.

dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail.³⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan atau menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Pinang di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten.

2) Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kawasan Wisata Gunung Pinang di Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten. Di sini penulis melakukan penelitian terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam memberdayakan masyarakat untuk membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021 –Juni 2021.

³⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cetakan Pertama, h. 2.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui :

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

Menurut supardi Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati pengamatan secara langsung kepada setiap orang yang dijadikan responden.

b. Wawancara

³⁸ Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*", (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 72.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara menurut Esterberg merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁹

Adapun yang dijadikan responden yaitu Bapak Agung sebagai Junior Manajemen Bisnis Perum Perhutani , Bapak Jamin sebagai SP wisata dan Opset Perum Perhutani, Bapak Naim sebagai ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cetakan Ketujuh, h. 316.

Pejaten, Bapak Sahroni sebagai Wakil ketua desa, dan beberapa masyarakat Desa Pejaten. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang ditulis secara garis besar. Peneliti melakukan wawancara dari setiap responden, kemudian mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan oleh responden yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Sugiyono menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film

dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi berupa rekaman audio wawancara dari wakil ketua desa, data profil desa, foto wisata, foto bersama Perum Perhutani, LMDH dan masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini beris tentang latar belakang masalah, Rumusanmasalah, Tujuan Penelitian,

⁴⁰ Albi Aggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), Cetakan Pertama, h. 255.

Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka, Kajian teori, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang Sejarah Desa Pejaten, Potensi umum, Kondisi geografis, Struktur pemerintahan desa, Jumlah penduduk, Mata pencaharian. Gambaran umum objek wisata Gunung Pinang. Sejarah Gunung Pinang, letak geografis objek wisata Gunung Pinang, fasilitas sarana dan prasarana, struktur kepengurusan LMDH.

BAB III : Bentuk Pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Gunung Pinang. Bab ini berisi tentang bentuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem PHBM, tahapan-tahapan pengelolaan, dan perkembangan perekonomian masyarakat.

BAB IV : Perkembangan wisata serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wisata Gunung Pinang. Bab ini berisi tentang perkembangan wisata,

faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wisata Gunung Pinang.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan, Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran atau dokumentasi.